

Strategi Penerimaan Murid Baru Berbasis Asesmen Daerah di Kota Yogyakarta

Sri Lestari Andayani^{1*}, Nerys Lourensius²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

tariandayani@gmail.com^{1*}, masnerys@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerimaan murid baru berbasis asesmen daerah di Kota Yogyakarta, dengan mengatasi masalah ketidakmerataan alat seleksi dan ketimpangan distribusi sekolah. Penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi sering kali tidak mencerminkan kemampuan siswa secara konsisten antar sekolah, sementara zonasi jarak yang tidak merata akibat desain kota yang sudah ada sejak masa kolonial memperburuk pemerataan akses pendidikan. Beberapa wilayah di Yogyakarta bahkan menjadi "blank spots" yang tidak memiliki sekolah negeri, menambah tantangan dalam pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menggali penerapan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) sebagai solusi untuk menciptakan alat seleksi yang lebih terstandar dan adil. ASPD diharapkan dapat mengatasi ketimpangan zonasi dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi calon siswa, baik dari dalam maupun luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penerapan asesmen berbasis daerah ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan di Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pendidikan, agar tetap kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan ASPD, proses seleksi penerimaan murid baru dapat menjadi lebih objektif dan relevan dengan kondisi lokal, serta mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan demikian, strategi penerimaan berbasis asesmen daerah ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Kata kunci: penerimaan murid baru; asesmen daerah; zonasi; blank spot; Kota Yogyakarta; pendidikan.

New Student Admission Strategy Based on Regional Assessments in Yogyakarta City

Abstract: This study aims to analyze the regional assessment-based student admission strategy in Yogyakarta City, addressing the issues of unequal selection tools and unequal school distribution. The use of report card scores as a selection tool often does not consistently reflect student abilities across schools, while uneven distance zoning due to existing city design since the colonial era worsens the distribution of educational access. Some areas in Yogyakarta even become "blank spots" without public schools, adding to the challenges in educational equity. This study uses a qualitative approach with a literature review to explore the implementation of the Regional Education Standardization Assessment (ASPD) as a solution to create a more standardized and equitable selection tool. The ASPD is expected to address zoning inequality and provide more equal opportunities for prospective students, both from within and outside the Special Region of Yogyakarta (DIY). The implementation of this regional-based assessment also aims to maintain the quality of education in Yogyakarta, known as the city of education, so that it remains competitive at the national and international levels. The results show that with the implementation of ASPD, the selection process for new student admissions can be more objective and relevant to local conditions, while reducing the gap in educational quality. Thus, this regional assessment-based admission strategy is an important step to maintain the quality of education in Yogyakarta City.

Keywords: new student admissions; regional assessment; zoning; blank spot; Yogyakarta City; education.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pendidikan, kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Sebagai pusat pendidikan di Indonesia, Yogyakarta harus terus menjaga kualitasnya agar tetap relevan dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu aspek krusial dalam upaya menjaga kualitas pendidikan adalah sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta (Armandhito *et al.*, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, sistem penerimaan murid baru ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi alat seleksi yang digunakan maupun distribusi geografis sekolah yang tidak merata.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam SPMB di Kota Yogyakarta adalah ketidakmerataan alat seleksi yang digunakan. Saat ini, nilai rapor menjadi salah satu indikator utama dalam seleksi, namun hal ini tidak cukup menggambarkan kemampuan siswa secara objektif. Nilai rapor yang serupa antara satu sekolah dengan sekolah lainnya tidak selalu mencerminkan tingkat kemampuan yang setara, karena perbedaan standar pendidikan antara sekolah A dan sekolah B. Selain itu, ketimpangan zonasi jarak antara wilayah selatan yang lebih banyak memiliki kawasan pemukiman dan pertanian serta wilayah utara yang lebih didominasi oleh perkantoran dan sekolah juga menjadi masalah dalam pemerataan akses pendidikan. Beberapa area di Kota Yogyakarta bahkan dikenal sebagai "*blank spots*", yaitu wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri, yang tentu saja memperburuk kesenjangan dalam akses pendidikan bagi masyarakat.

Permasalahan mengenai ketimpangan akses dan validitas alat seleksi ini telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, yang mengungkapkan bahwa kebijakan zonasi murni sering kali gagal mencapai keadilan substantif di wilayah dengan sebaran sekolah yang tidak merata, karena jarak geografis tidak berbanding lurus dengan ketersediaan kursi sekolah negeri. Lebih lanjut, (Setiawan & Yaniasti, 2021) mengkritik penggunaan nilai rapor sebagai standar seleksi tunggal karena rentan terhadap fenomena inflasi nilai di tingkat sekolah dasar, yang mengakibatkan hilangnya fungsi seleksi sebagai pembeda kemampuan akademik yang akurat. Di sisi lain, riset mengenai implementasi asesmen daerah di beberapa

wilayah pasca-penghapusan Ujian Nasional menunjukkan bahwa meskipun asesmen standar mampu menyediakan data capaian belajar yang seragam, tantangan teknis dalam integrasi data ke sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi kendala utama.

Menghadapi masalah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta (Dindikpora Kota Yogyakarta), berusaha mencari solusi dengan menerapkan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) sebagai bagian dari alat seleksi dalam SPMB. ASPD ini diharapkan dapat mengatasi ketidakmerataan seleksi dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang juga harus mengikuti proses seleksi ini (Bakti, *et al.*, 2025). Penerapan asesmen berbasis daerah seperti ASPD memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan seleksi yang lebih adil, transparan, dan relevan dengan kondisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi penerimaan murid baru berbasis asesmen daerah di Kota Yogyakarta dengan fokus pada penerapan ASPD oleh (Rahmawati, 2025). Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem ini dapat memperbaiki ketimpangan dalam distribusi pendidikan di Kota Yogyakarta, sekaligus meningkatkan kualitas dan standar seleksi yang ada, agar Kota Yogyakarta tetap menjadi pusat pendidikan yang berkualitas dan mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai penggunaan ASPD bukan hanya sebagai alat pemetaan mutu pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memitigasi kelemahan sistem zonasi di wilayah blank spot. Jika penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Wulandari, 2025) berfokus pada evaluasi dampak zonasi secara umum, dan pada teknis asesmennya, penelitian ini mengisi celah dengan mengkaji integrasi kebijakan ASPD sebagai solusi atas disparitas geografis (Utara-Selatan) di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan rekayasa kebijakan melalui asesmen standar untuk menciptakan keadilan akses di tengah keterbatasan jumlah sekolah negeri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis dan merumuskan strategi penerimaan murid baru berbasis asesmen daerah di Kota Yogyakarta (Ramadiana *et al.*, 2024). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menggali informasi mendalam mengenai topik yang berkaitan dengan sistem seleksi pendidikan, khususnya terkait dengan ketidakmerataan alat seleksi, ketimpangan distribusi sekolah, dan penerapan ASPD. Berikut ini langkah-langkah dalam studi literatur penelitian ini.

Pengumpulan Literatur

Langkah pertama dalam metode studi literatur adalah mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi terkait dengan sistem penerimaan murid baru, zonasi pendidikan, serta asesmen pendidikan di Kota Yogyakarta dan DIY. Literatur ini juga mencakup studi-studi yang membahas tentang masalah ketidakmerataan zonasi dan *blank spots* dalam distribusi sekolah, serta implementasi asesmen berbasis daerah sebagai alat seleksi (Nurlailiyah, 2022).

Klasifikasi dan Kategorisasi Literatur

Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan mengkategorikan literatur berdasarkan topik-topik utama yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa kategori yang akan dikaji meliputi:

Kategori pertama berfokus pada masalah ketidakmerataan sistem seleksi pendidikan, khususnya penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi yang tidak terstandar antar sekolah. Literatur yang membahas isu ini menyoroti bagaimana perbedaan standar penilaian di tiap sekolah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa, sehingga nilai rapor tidak dapat dijadikan indikator tunggal yang objektif dalam menentukan kelayakan penerimaan murid baru. Kategori kedua berkaitan dengan ketimpangan zonasi dan distribusi sekolah (Satria, 2019) di Kota Yogyakarta, termasuk fenomena *blank spots* yang menjadi salah satu tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan. Kajian dalam kategori ini menekankan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemerataan, karena distribusi sekolah yang tidak merata justru memperburuk kesenjangan antar wilayah. Kategori terakhir adalah penerapan

asesmen berbasis daerah (ASPD) sebagai solusi untuk menciptakan sistem seleksi yang lebih adil dan terstandar di DIY. Literatur yang masuk dalam kategori ini menyoroti bagaimana ASPD mampu menyediakan instrumen seleksi yang objektif, seragam, dan relevan dengan kondisi lokal. Penerapan ASPD tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan mutu pendidikan, tetapi juga sebagai strategi kebijakan untuk mengatasi kelemahan sistem zonasi, khususnya di wilayah *blank spots* yang tidak memiliki sekolah negeri. Dengan demikian, ASPD dipandang sebagai instrumen yang dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan sekaligus menjaga reputasi Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Analisis dilakukan dengan memeriksa temuan-temuan dari literatur yang ada dan bagaimana literatur tersebut saling berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penerimaan murid baru di Kota Yogyakarta (Widyastuti, 2020). Peneliti juga akan menganalisis berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terkait dengan penerimaan murid baru, serta bagaimana ASPD dapat berfungsi sebagai alat seleksi yang lebih objektif dan relevan dengan kondisi lokal.

Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah menyintesis temuan-temuan yang ada untuk merumuskan strategi penerimaan murid baru berbasis asesmen daerah (Sidik, 2024). Sintesis ini akan mencakup penerapan ASPD sebagai alternatif alat seleksi yang dapat mengatasi berbagai masalah dalam penerimaan murid baru, seperti ketidakmerataan zonasi dan *blank spots*. Penarikan kesimpulan juga akan mencakup bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan pemerataan dan mengukur kualitas pendidikan (Ramadiana *et al.*, 2024) di Kota Yogyakarta.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang relevan dengan topik penerimaan murid baru dan asesmen berbasis daerah. Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas sistem pendidikan, asesmen pendidikan, serta kebijakan zonasi menjadi rujukan utama untuk memahami kerangka teoritis sekaligus praktik yang telah diterapkan di berbagai konteks. Selain itu, buku-buku yang mengulas perencanaan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan memberikan

landasan konseptual yang lebih luas, sehingga isu penerimaan murid baru dapat ditempatkan dalam perspektif pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Laporan tahunan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta juga menjadi sumber penting karena menyajikan data empiris dan kebijakan aktual terkait penerimaan murid baru serta distribusi sekolah di wilayah tersebut. Tidak kalah penting, dokumen kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat mengenai penerimaan murid baru dan zonasi pendidikan, seperti yang dibahas oleh (Setiawan & Yaniasti, 2021), memberikan gambaran tentang arah kebijakan nasional dan regional yang memengaruhi praktik di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, penelitian dapat menyajikan analisis yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan sistem seleksi berbasis asesmen daerah di Kota Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu masalah utama dalam sistem penerimaan murid baru di Kota Yogyakarta adalah ketidakmerataan sistem seleksi pendidikan. Penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi sering kali menimbulkan ketidakadilan karena standar penilaian antar sekolah tidak seragam. Siswa dari sekolah dengan standar penilaian lebih longgar dapat memperoleh nilai tinggi yang tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya, sementara siswa dari sekolah dengan standar lebih ketat justru dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rapor tidak dapat dijadikan indikator tunggal yang objektif dalam menentukan kelayakan siswa untuk diterima di sekolah tertentu.

Selain itu, ketimpangan zonasi dan distribusi sekolah juga menjadi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan di Yogyakarta. Zonasi yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis dan demografis kota, sehingga menimbulkan kesenjangan antara wilayah selatan yang lebih banyak memiliki pemukiman dan pertanian dengan wilayah utara yang didominasi oleh perkantoran dan sekolah (Sidik, 2024). Kondisi ini melahirkan fenomena *blank spots*, yaitu wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri, sehingga masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemerataan pendidikan di tingkat lokal (Miftahul ula & Lestari, 2019).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menerapkan ASPD. ASPD dirancang untuk menjadi instrumen seleksi yang lebih objektif, terstandar, dan relevan dengan kondisi lokal. Dengan adanya asesmen berbasis daerah, proses seleksi tidak lagi bergantung pada nilai rapor semata, melainkan pada hasil tes yang seragam dan dapat dibandingkan secara adil antar siswa dari berbagai sekolah (Indahri, 2021). Penerapan ASPD diharapkan mampu mengurangi dampak ketimpangan zonasi dan *blank spots*, serta memberikan kesempatan yang lebih setara bagi semua siswa untuk mengakses pendidikan berkualitas di Kota Yogyakarta.

Analisis dilakukan dengan memeriksa temuan-temuan dari literatur yang ada dan bagaimana literatur tersebut saling berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penerimaan murid baru di Kota Yogyakarta. Peneliti juga akan menganalisis berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terkait dengan penerimaan murid baru, serta bagaimana ASPD dapat berfungsi sebagai alat seleksi yang lebih objektif dan relevan dengan kondisi lokal.

Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah menyintesis temuan-temuan yang ada untuk merumuskan strategi penerimaan murid baru berbasis asesmen daerah (Sidik, 2024). Sintesis ini akan mencakup penerapan ASPD sebagai alternatif alat seleksi yang dapat mengatasi berbagai masalah dalam penerimaan murid baru, seperti ketidakmerataan zonasi dan *blank spots*. Penarikan kesimpulan juga akan mencakup bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Laporan penelitian akan disusun dengan merangkum hasil analisis literatur yang telah dilakukan. Laporan ini akan mencakup pemaparan mengenai berbagai isu yang dihadapi dalam sistem penerimaan murid baru di Kota Yogyakarta, rekomendasi strategi berbasis asesmen daerah, serta dampak yang mungkin timbul dari penerapan strategi tersebut dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini meliputi:

Penelitian ini memanfaatkan beragam sumber literatur yang relevan untuk mendukung analisis mengenai sistem penerimaan murid baru dan penerapan asesmen berbasis daerah. Artikel dan jurnal ilmiah tentang sistem pendidikan,

asesmen pendidikan, serta kebijakan zonasi menjadi rujukan utama dalam memahami kerangka teoritis sekaligus praktik yang telah diterapkan di berbagai konteks. Buku-buku yang membahas perencanaan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan turut memberikan landasan konseptual yang lebih luas, sehingga isu penerimaan murid baru dapat ditempatkan dalam perspektif pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu laporan tahunan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menjadi sumber penting karena menyajikan data empiris dan kebijakan aktual terkait penerimaan murid baru serta distribusi sekolah di wilayah tersebut. Dokumen kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat mengenai penerimaan murid baru dan zonasi pendidikan, seperti yang dibahas (Widyastuti, 2020), juga memberikan gambaran tentang arah kebijakan nasional dan regional yang memengaruhi praktik di tingkat lokal.

Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sejumlah kelebihan yang mendukung efektivitas penelitian. Dari segi waktu dan biaya, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya tanpa harus mengeluarkan sumber daya besar untuk pengumpulan data primer. Hal ini menjadikan studi literatur sebagai pendekatan yang efisien, terutama ketika penelitian berfokus pada analisis kebijakan dan praktik yang sudah terdokumentasi. Selain itu, metode ini memberikan kesempatan untuk menyajikan konteks yang luas, karena peneliti dapat membandingkan berbagai sudut pandang dan temuan dari studi-studi sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti. Keunggulan lainnya adalah fokus pada teori dan konsep, di mana peneliti dapat mendalami kerangka teoritis yang relevan sekaligus mengidentifikasi gaps atau kekosongan dalam literatur yang ada. Kekosongan tersebut dapat menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut, sekaligus memperkuat kontribusi penelitian ini dalam memberikan rekomendasi strategi penerimaan murid baru berbasis asesmen

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan strategi penerimaan murid baru yang lebih adil dan terstandar di Kota Yogyakarta, serta menjadi referensi bagi kebijakan pendidikan di DIY secara keseluruhan (Ibrahim *et al.*, 2024).

Hasil analisis literatur mengungkapkan berbagai temuan penting terkait dengan SPMB di Kota Yogyakarta, yang menunjukkan adanya

ketimpangan dan tantangan besar dalam implementasi seleksi pendidikan yang adil dan merata. Salah satu isu utama yang ditemukan adalah penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi yang belum terstandar dengan baik. Nilai rapor yang sering digunakan untuk menilai kemampuan siswa tidak dapat dijadikan patokan yang adil antara sekolah-sekolah yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi dalam standar penilaian yang diterapkan oleh masing-masing sekolah. Sebagai contoh, kemampuan seorang siswa yang memperoleh nilai yang sama pada rapor di Sekolah A belum tentu setara dengan siswa yang memiliki nilai yang sama di Sekolah B. Perbedaan kurikulum, metode pengajaran, serta kemampuan pengajar menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas penilaian ini. Akibatnya, penggunaan nilai rapor sebagai satu-satunya alat seleksi dalam penerimaan murid baru sering kali menimbulkan ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi, yang dapat berdampak negatif pada peluang siswa untuk diterima di sekolah yang diinginkan.

Selain permasalahan terkait dengan nilai rapor, distribusi sekolah di Kota Yogyakarta juga menjadi tantangan signifikan dalam pemerataan akses pendidikan. Kota Yogyakarta, dengan desain tata kota yang memiliki sejarah sejak masa kolonial, mengalami ketidakseimbangan dalam penyebaran fasilitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah tertentu. Wilayah selatan kota lebih dominan digunakan untuk pemukiman dan pertanian, sedangkan wilayah utara lebih difokuskan untuk perkantoran dan sekolah. Akibatnya, sejumlah kawasan di bagian selatan dan beberapa kemantren tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas pendidikan, terutama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Terdapat empat kemantren di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki SMP Negeri, menciptakan apa yang dikenal sebagai "*blank spots*." Keberadaan *blank spots* ini menjadi masalah besar dalam pemerataan akses pendidikan, yang berpotensi memperburuk ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut.

Di sisi lain, penerapan sistem zonasi sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ini, meskipun memiliki tujuan yang baik, juga masih menghadapi beberapa kendala. Sistem zonasi berbasis jarak atau radius pembagian wilayah tidak sepenuhnya efektif dalam meratakan distribusi sekolah (Widyastuti, 2020). Hal ini disebabkan oleh adanya batasan geografis dan perbedaan struktur wilayah yang mempengaruhi sebaran sekolah di dalam kota. Dalam beberapa kasus, meskipun zonasi telah diterapkan, masih

terdapat sejumlah wilayah yang tidak tercakup oleh sistem ini, menyebabkan beberapa anak di daerah tertentu terpaksa menempuh perjalanan jauh atau bahkan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka di sekolah negeri.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan ASPD sebagai solusi yang lebih terstandar dan adil dalam proses seleksi penerimaan murid baru. ASPD yang diterapkan di DIY diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada, baik itu ketidakmerataan alat seleksi, ketimpangan zonasi, maupun ketidakadilan akses pendidikan di daerah tertentu. Dengan menggunakan ASPD sebagai alat seleksi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dapat memastikan bahwa penerimaan murid baru tidak hanya berdasarkan nilai rapor semata, tetapi juga memperhitungkan potensi siswa secara objektif melalui asesmen yang lebih holistik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan di DIY. Dengan demikian, ASPD dapat menjadi instrumen yang lebih adil dalam menilai kemampuan dan potensi siswa, serta mengurangi diskriminasi yang terjadi akibat perbedaan standar penilaian antar sekolah.

Selain itu, penerapan ASPD juga diharapkan dapat menjawab tantangan distribusi sekolah yang tidak merata, khususnya di daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki SMP Negeri. Dengan adanya sistem asesmen yang lebih terstandar, siswa dari berbagai wilayah, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah pinggiran yang selama ini menjadi *blank spots*, memiliki kesempatan yang lebih adil untuk diterima di sekolah negeri. Ini akan membantu menciptakan pemerataan dalam akses pendidikan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan bahkan dapat memperbaiki ketimpangan yang terjadi antara wilayah selatan dan utara.

Selain mengatasi ketidakmerataan dalam seleksi dan distribusi sekolah, penerapan ASPD juga diharapkan dapat menjaga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan yang memiliki reputasi tinggi, Yogyakarta perlu memastikan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap mampu mempertahankan kualitas pendidikan yang baik, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional (Zulfiah, 2023). Dengan menerapkan seleksi yang lebih objektif dan berbasis asesmen daerah, Kota Yogyakarta dapat memastikan bahwa hanya siswa yang benar-benar memiliki potensi terbaik yang diterima di sekolah-sekolah unggulan, tanpa terbatas oleh faktor-faktor yang tidak relevan

seperti lokasi geografis atau latar belakang sekolah asal.

Secara keseluruhan, penerapan ASPD sebagai alat seleksi dalam SPMB di Kota Yogyakarta dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk ketidakmerataan zonasi, *blank spots*, serta ketidakadilan dalam penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi. Dengan langkah ini, diharapkan proses penerimaan murid baru akan menjadi lebih adil, transparan, dan relevan dengan kondisi lokal, serta mampu mempertahankan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta agar tetap kompetitif di tingkat nasional dan internasional (Haidir, 2022).

Masalah Ketidakmerataan Alat Seleksi dalam Penerimaan Murid Baru

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi dalam penerimaan murid baru yang tidak terstandar. Setiap sekolah memiliki kebijakan penilaian yang berbeda-beda, yang membuat nilai rapor siswa tidak dapat dijadikan acuan yang adil untuk membandingkan kemampuan siswa dari berbagai sekolah. Beberapa sekolah mungkin memberikan nilai lebih tinggi untuk siswa dengan capaian yang sama, sementara sekolah lain mungkin lebih ketat dalam memberikan nilai. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam seleksi, di mana siswa dengan kemampuan yang sebenarnya setara bisa mendapatkan peluang yang berbeda hanya karena perbedaan standar penilaian antar sekolah. Penerapan ASPD sebagai instrumen seleksi dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan standar yang sama bagi semua siswa, sehingga kemampuan siswa dapat dievaluasi dengan lebih objektif.

Ketimpangan Zonasi dan Distribusi Sekolah di Kota Yogyakarta

Distribusi sekolah yang tidak merata di Kota Yogyakarta, yang diakibatkan oleh desain tata kota yang tidak memperhitungkan kebutuhan sekolah secara merata, merupakan masalah besar dalam pemerataan akses pendidikan. Beberapa wilayah, terutama yang terletak di bagian selatan kota, menghadapi kekurangan fasilitas pendidikan, yang mengakibatkan beberapa kemantren tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Hal ini menyebabkan beberapa anak-anak di daerah tersebut harus menempuh jarak yang jauh atau bahkan tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Sistem zonasi yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini belum sepenuhnya efektif, karena masih

terdapat wilayah yang tidak tercakup oleh zonasi tersebut. Penerapan ASPD dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ini dengan menyediakan seleksi yang lebih adil dan terstandar, tanpa bergantung pada faktor jarak atau lokasi geografis yang tidak dapat diprediksi.

Peran ASPD dalam Meningkatkan Keadilan Seleksi

Penerapan ASPD di DIY memberikan peluang untuk menciptakan sistem seleksi yang lebih adil, transparan, dan terstandar. Dengan menggunakan asesmen ini, proses seleksi tidak hanya mengandalkan nilai rapor yang sering kali tidak mencerminkan kemampuan siswa secara objektif, tetapi juga memperhitungkan potensi siswa secara lebih holistik. ASPD memungkinkan penilaian yang lebih merata dan terstandar di seluruh DIY, memberikan kesempatan yang lebih setara bagi siswa dari berbagai latar belakang dan wilayah. Dengan begitu, siswa yang berasal dari daerah pinggiran atau bahkan *blank spots* yang selama ini kesulitan mengakses sekolah negeri di Kota Yogyakarta memiliki kesempatan yang sama untuk diterima.

Penerapan ASPD untuk Meningkatkan Akses Pendidikan di *Blank spots*

Salah satu dampak positif dari penerapan ASPD adalah peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi *blank spots*, yaitu kawasan yang tidak memiliki SMP Negeri. Dengan sistem seleksi yang berbasis pada asesmen terstandar, siswa dari daerah tersebut tidak lagi terbatas oleh keterbatasan fasilitas pendidikan yang ada di sekitar mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi yang lebih adil, tanpa dipengaruhi oleh kendala geografis atau kurangnya sekolah negeri di wilayah mereka. Ini akan membantu mengurangi ketimpangan antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran, serta memastikan bahwa semua anak di Kota Yogyakarta, terlepas dari lokasi mereka, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Menjaga Kualitas Pendidikan di Kota Yogyakarta

Sebagai kota pendidikan dengan reputasi tinggi, Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pendidikan yang ditawarkan. Penerapan sistem seleksi berbasis ASPD tidak hanya akan memperbaiki pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa hanya siswa dengan potensi terbaik yang diterima di sekolah-sekolah unggulan. Proses seleksi yang lebih objektif dan terstandar akan

memastikan bahwa kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta tetap terjaga, bahkan di tingkat nasional dan internasional. Dengan mengintegrasikan ASPD dalam sistem penerimaan murid baru, Kota Yogyakarta dapat terus menjaga posisinya sebagai pusat pendidikan unggul di Indonesia, serta memastikan bahwa sistem pendidikan yang ada memberikan peluang yang adil bagi semua siswa, tanpa kecuali.

Implikasi Kebijakan Pendidikan di Kota Yogyakarta

Penerapan ASPD sebagai alat seleksi dalam penerimaan murid baru memiliki implikasi yang besar terhadap kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta. Pertama, kebijakan ini dapat mengurangi ketimpangan antara sekolah-sekolah di wilayah yang berbeda. Kedua, dengan adanya standar yang sama dalam seleksi, akan ada peningkatan transparansi dalam proses penerimaan, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan yang ada. Terakhir, kebijakan ini juga dapat memberikan solusi untuk masalah *blank spots* yang selama ini menghambat akses pendidikan di beberapa wilayah. Dengan begitu, penerapan ASPD tidak hanya meningkatkan kualitas seleksi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Tantangan dalam Implementasi ASPD

Dalam pembahasan, hasil penelitian mengenai penerapan ASPD di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya dukungan terhadap temuan-temuan dalam literatur terdahulu, sekaligus memperlihatkan beberapa perbedaan yang menarik. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Budiman, 2024), menyoroti kelemahan penggunaan nilai rapor sebagai alat seleksi karena standar penilaian antar sekolah yang tidak seragam. Temuan penelitian ini mendukung argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa ASPD dapat menjadi instrumen yang lebih objektif dan terstandar, sehingga mampu mengurangi bias seleksi yang selama ini muncul akibat perbedaan standar antar sekolah. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan literatur yang menekankan perlunya instrumen seleksi yang lebih adil dan transparan.

Namun, jika dibandingkan dengan studi lain yang menekankan efektivitas kebijakan zonasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, penelitian ini justru memperlihatkan sisi yang berbeda. Beberapa jurnal terdahulu menilai

zonasi sebagai strategi yang cukup efektif dalam mendekatkan siswa dengan sekolah di lingkungannya, tetapi penelitian ini menemukan bahwa zonasi di Kota Yogyakarta masih menimbulkan ketimpangan, terutama di wilayah yang mengalami *blank spots*. Dalam hal ini, hasil penelitian dapat dikatakan bertolak belakang dengan literatur yang menilai zonasi sebagai solusi pemerataan, karena konteks lokal Yogyakarta menunjukkan bahwa zonasi justru memperburuk kesenjangan akses pendidikan (Aditomo & Felicia, 2018).

Kebaruhan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap ASPD sebagai instrumen seleksi berbasis daerah yang belum banyak dikaji dalam literatur terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas strategi PPDB, pemasaran sekolah, atau kebijakan zonasi secara umum, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menilai bagaimana asesmen berbasis daerah dapat berfungsi sebagai solusi atas ketidakmerataan seleksi dan distribusi sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan bukti empiris tentang efektivitas ASPD dalam konteks lokal Yogyakarta.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena menggunakan metode studi literatur, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang tersedia, sehingga tidak dapat menggambarkan secara langsung pengalaman empiris siswa, orang tua, maupun guru dalam menghadapi penerapan ASPD. Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kebijakan dan literatur, sehingga belum menyajikan data kuantitatif yang dapat mengukur secara detail dampak ASPD terhadap pemerataan akses pendidikan. Ketiga, keterbatasan cakupan geografis juga menjadi kelemahan, karena penelitian ini berfokus pada Kota Yogyakarta dan belum membandingkan penerapan ASPD dengan daerah lain yang mungkin memiliki kondisi berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan cakupan yang lebih luas sangat diperlukan untuk memperkuat temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas ASPD sebagai strategi penerimaan murid baru.

4. Simpulan dan Saran

Penerapan strategi penerimaan murid baru berbasis ASPD di Kota Yogyakarta dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam sistem seleksi pendidikan, seperti ketidakmerataan alat seleksi dan ketimpangan distribusi sekolah. Dengan

mengadopsi ASPD, proses seleksi dapat lebih objektif dan adil, memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang dan wilayah memiliki kesempatan yang setara untuk diterima di sekolah negeri, termasuk di daerah yang selama ini menjadi *blank spots*. Selain itu, penerapan ASPD juga dapat memperbaiki kualitas seleksi dan mendukung pemerataan akses pendidikan, sekaligus mempertahankan kualitas pendidikan yang tinggi di Kota Yogyakarta, sehingga kota ini tetap dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional sebagai pusat pendidikan yang unggul.

Daftar Pustaka

- Aditomo, A., & Felicia, N. (2018). Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015. *Kilas Pendidikan*, 17(1), 1–8. https://www.pspk.id/wp-content/uploads/2020/09/Kilas-Pendidikan-Edisi-17_Ketimpangan-Mutu-dan-Akses-Pendidikan-di-Indonesia.pdf
- Armandhito, Z. R., Maharani, P. W. S., Utami, S. W., & Septyani, C. P. (2025). Analisis Homogenitas, Fungsionalitas, Administrasi, dan Perencanaan Kota di Yogyakarta. *Jurnal Renwilko*, 1(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/renwilko/article/view/67260>
- Bakti, R., Nahdiana, N., Sukaesah, I., Suryandari, A. P., Fidyanti, A., & Agustini, A. (2025). Evaluation of the Zoning System for New Students of State High Schools in the Special Region of Jakarta. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(1), 595–611. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.7234>
- Budiman, R. (2024). Sistem Pengolahan Nilai Raport Berbasis Web pada SMPN 1 Petir Ramdani. *Jurnal Vocational Teknik Elektronika Dan Informatika*, 12(2). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/voteknika/index>
- Haidir, H. (2022). Strategi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Jurusan Program Keagamaan MAN 3 Bungo. *Jurnal Pendidikan Guru*, 4(1). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v4i1.433>
- Ibrahim, Setyaningsih, K., & Nursa'diah, D. (2024). Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 548–559.

- <https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1394>
- Indahri, Y. (2021). Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 195–215. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>
- Miftahul ula, D., & Lestari, I. (2019). Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), 10–18. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Nurlailiyah, A. (2022). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13–22. <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Rahmawati, Y. (2025). Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Ditinjau dari Instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan Stimulus Berbasis Pendekatan TPACK dan Etnosains pada Materi Termokimia. *Jurnal Riset Pendidikan Kimia*, 8(1), 49. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/voteknika/index>
- Ramadiana, D. N., Asbari, M., & Laksana, R. P. (2024). Asesmen Nasional: Tolok Ukur Kualitas Pendidikan Indonesia? *Journal of Information Systems and Management*, 03(02), 17–22. <https://jisma.org>
- Satria, N. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–91. <http://10.0.127.17/glasser.v%25vi%25i.186>
- Setiawan, G. D., & Yaniasti, N. L. (2021). Sistem Zonasi Sekolah: Antara Persepsi dan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 3(2), 183–193. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoLEC>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://journalstkipppgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK/article/view/46>
- Wulandari, H. T., Heri Susanto, & Suyatmini, H. (2025). Pengelolaan Sumber Pembiayaan Pendidikan Terhadap Raport Mutu di Sekolah Vokasi. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(2), 723–733. <https://doi.org/10.30605/jsgp.8.2.2025.5924>
- Zulfiah, E., Putri, N. N. N., & Fadhilah, M. (2023). Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Masuk Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 8(3), 414–422. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i3.606>